Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020

Erfianti Rahmayani

Abstrak

Pada penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang dikaji. Pertama adalah bagaimana diskriminasi hak politik pada para penyandang disabilitas, dan yang kedua bagaimana kehadiran negara dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Politik Penyandang Disabilitas, dan Dialektika *Civil Society* dan Negara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terutama dalam sosialisasi dan sarana prasarana masih terdapat adanya diskriminasi. Kemudian, dalam hal kehadiran negara, KPU Kota Surabaya telah berupaya untuk memenuhi hak politik para penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti program Relawan Demokrasi (Relasi) bagi penyandang disabilitas. Hasilnya, pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pemilih penyandang disabilitas yang cukup signifikan.

Kata Kunci: *Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pilkada*

Erfianti Rahmayani adalah sarjana program studi ilmu politik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Corresponding Author :

Erfianti Rahmayani is a fresh graduate of political science student at Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Pendahuluan

Demokrasi yaitu susunan di dalam hidup bernegara yang menjadi pilihan beberapa negara yang terdapat di dunia, termasuk Indonesia. Demokrasi berasal dari kata “*demos*” dan “*kratos*” yang artinya pemerintahan dari rakyatnya untuk rakyatnya dan oleh rakyatnya. Di dalam karya Hendra Nurtjahyo, yaitu Filsafat Demokrasi, menurut Frans Magnis Suseno menjelaskan jika terdapat 5 kriteria negara dengan sistem demokratis, ialah pertama negara yang berasaskan hukum, kedua masyarakat mengawasi pemerintah secara nyata, ketiga yaitu berprinsip mayoritas, keempat pemilihan umum yang bebas, dan yang terakhir terdapat jaminan terhadap hak-hak demokratis.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, suatu negara belum dapat dikatakan demokrasi jika di suatu negara mengesampingkan hak-hak politik pada kelompok tertentu khususnya kepada para penyandang disabilitas.

Di dalam sistem demokrasi, keikutsertaan saat pemilihan umum ialah suatu hak politik setiap warga negaranya. Hak tersebut termasuk hak menyelidiki juga meninjau alternatif yang tersedia serta hak berperan di dalam menentukan siapa yang hendak dipilih di dalam Pemilu.² Hak itu pula yang harus dimiliki oleh para penyandang disabilitas, karena semua tahu bahwa di dunia ini tak ada manusia yang sempurna sehingga terdapat sebagian dari saudara kita yang terlahir dengan keadaan memiliki kekurangan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadikan hilangnya suatu harkat serta martabat para penyandang disabilitas, apalagi menjadikan suatu alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka karena mereka layak untuk disejajarkan dengan warga lainnya dalam segala hal, tidak hanya pada bidang politik namun juga ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menjadi pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengamanahkan jika seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar di dalam hukum maupun pemerintahan.³

Di Indonesia, permasalahan hak-hak politik penyandang disabilitas masihlah menjadi permasalahan serius dan terus dibicarakan, karena masih banyak diskriminasi terhadap penerapan pemenuhan hak politik mereka. Upaya yang dilakukan dirasa belum maksimal agar penyandang disabilitas dapat berperan dalam bidang politik. Padahal jika kita melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan hak

¹ Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Hal 74

² Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001). Hal 68

³ Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”

politik penyandang disabilitas yaitu hak untuk dipilih juga memilih di dalam kedudukan pemerintahan, kemudian hak untuk menyampaikan aspirasi dalam bidang politik baik secara tertulis maupun dalam bentuk lisan, hak untuk memilih dan membuat partai politik ataupun perseorangan untuk terlibat menjadi kontestan dalam Pemilu, hak untuk membentuk pengurus organisasi masyarakat ataupun partai politik, hak untuk bergabung di dalam organisasi penyandang disabilitas tingkat lokal sampai tingkat internasional, hak untuk berpartisipasi aktif pada sistem pemilu serta hak untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang politik.

Di dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, baru di tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mendata jumlah total penyandang disabilitas yang memilih baik telah terdaftar pada DPT maupun yang memberikan hak pilihnya. Berdasarkan Laporan Pemilihan Umum Walikota Surabaya pada tahun 2015 KPU Kota Surabaya, total keseluruhan penyandang disabilitas yang telah terdaftar pada Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2015 berjumlah 1.467 orang. Selanjutnya, dilihat dari hasil data perhitungan suaranya, diketahui jika total penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebesar 38,86% atau sebanyak 572 pemilih dari jumlah keseluruhan pemilih penyandang disabilitas yang telah terdaftar di DPT.

Tabel 1.1

Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015

No	Pemilih Disabilitas	Total	Persentase
1	Terdaftar	1.467	100%
2	Pengguna	572	38,86%
3	Golput	896	61,14%

Sumber: Ade Ivan Al-Hakim, 2017

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di dalam Pilwali Tahun 2015 sangatlah rendah. Dapat dikarenakan pada saat pemilihan, penyandang disabilitas masihlah menghadapi banyak sekali kendala, khususnya masalah aksesibilitas dan fasilitas dalam penggunaan hak pilihnya yang meliputi aksesibilitas fisik dan non-fisik. Kemudian, pada tahun 2015 teknologi tidak segenar pada saat ini yang mengakibatkan pola strategi sosialisasi kepada para penyandang disabilitas tidaklah maksimal. Seperti pada pemaparan salah satu informan penyandang disabilitas tuna wicara, berikut pemaparannya:

“...Pada Pilwali 2015 yang dulu saya terdaftar sebagai DPT dan ikut nyoblos juga tapi tidak pernah dapat sosialisasi apapun tentang calon walikota dan wakil walikota begitupun fasilitas dan aksesibilitas yang diberikan seingat saya kurang baik...” (Muhammad Shobirin Dhoffir, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Penyelenggara Pemilu sangatlah penting untuk dapat memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020. Apalagi pada saat ini, teknologi telah berkembang, sosialisasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan memanfaatkan berbagai macam media teknologi. Kota Surabaya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap para penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020, memiliki total DPT Penyandang Disabilitas sebanyak 1.956 jiwa dari total keseluruhan jumlah DPT sebanyak 2.089.027 jiwa. Jika dibandingkan dengan angka jumlah DPT penyandang disabilitas pada tahun 2020 lebih besar. Untuk itu, perlu adanya perhatian kembali dalam hal pemenuhan hak politiknya.

Berdasarkan paparan diatas, menjadi seseorang yang penyandang disabilitas bukanlah suatu pilihan. Demikian merupakan pemberian dari Tuhan YME. Karena itu, penyandang disabilitas harus tetap mempunyai suatu kedudukan, hak, kewajiban, serta pelayanan yang sama tanpa sebuah diskriminasi. Namun faktanya, di lapangan menunjukkan para penyandang disabilitas adalah kelompok paling rentan serta termajinalkan. Kelompok tersebut belum mendapat haknya serta kesempatan dan perlakuan supaya dapat bertingkah laku dan beraktivitas sesuai dengan kondisi kelompok tersebut.⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian lebih dalam dengan judul “**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA**” agar dapat mengetahui serta menjelaskan secara lebih mendalam tentang hak-hak politik penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas pada Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2020. Karena hal demikian adalah perwujudan suatu prinsip keterbukaan dan hak umum bagi setiap warga negara dengan menggunakan sistem demokrasi sebagai halnya Indonesia.

⁴ Zain Daulay, “*Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) dan Implikasinya dalam Kebijakan, Pembangunan Daerah yang Inklusi serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*”, Makalah Seminar Sehari, Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat, 2013. Hal 1

Kerangka Teori

1. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Setelah berubahnya Amandemen UUD 1945, seluruh anggota lembaga perwakilan di Indonesia melakukan Pemilu yang diadakan secara berkala sebagai salah satu pilar utama negara dengan sistem demokrasi. Menurut Ibnu Tricahyo, Pemilu ialah untuk melahirkan kedaulatan warga untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan wadah mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan warga.⁵ Sementara itu, Sudarsono mengatakan pemilu adalah persyaratan minimal demokrasi guna membentuk pemerintahan yang demokrasi. Tujuannya untuk memilih presiden, wakil daerah, dan wakil rakyat.⁶

Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, salah satu dari Pemilihan Umum adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pada akhir tahun 2015. Indonesia melakukan Pilkada Serentak untuk yang pertama kalinya. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur Daerah dan Wakilnya, Pemilihan Gubernur Daerah merupakan wadah bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Pancasila dan UUD 1945, Gubernur dan Bupati/Walikota dipilih.⁷ Selain itu, menurut Intarto, Pilkada memahami proses politik pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu pemilihan umum yang demokratis berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Politik Penyandang Disabilitas

Kata politik merupakan kata yang diserap dari istilah bahasa Inggris yaitu "*politics*" yang pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles. Kata *polis* (Yunani) berarti kota (*city*), yang kemudian menjadi negara kota (*city state*) dalam bahasa Yunani Klasik. Aristoteles mengatakan bahwa politik adalah hakikat dari keberadaan manusia dalam kehidupan publik.⁸ Kemudian, menurut Miriam Budiardjo, politik adalah suatu usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga negara untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang harmonis.⁹ Lebih lanjut lagi, menurut Anwar Arifin, politik adalah aktivitas manusia dalam masyarakat, khususnya perjuangan pengangkatan atau pemilihan

⁵ Ibnu T, "*Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*" (Malang: Trans Publishing, 2009). Hal.6

⁶ T. Soedarsono. "*Dinamika Kelompok*" (Universitas Terbuka Jakarta, 2005). Hal.1

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

⁸ Anwar Arifin, "*Politik Pencitraan Politik*" (Jakarta: Graha Ilmu, 2014) hal 7.

⁹ Miriam Budiardjo. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal.15

penguasa, fungsinya untuk menentukan ketertiban umum. Tindakan politik juga mencakup proses penetapan tujuan, termasuk status, kekuasaan, pengambilan keputusan, politik, pengaruh, wewenang, kepentingan dan pemerintahan sebagai cakupan politik.¹⁰

Menurut UU No.8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹¹ Pengertian penyandang disabilitas termasuk dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CPRD). Konvensi tersebut mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang mengalami gangguan mental, fisik, intelektual, sensorik dalam jangka waktu panjang, serta membutuhkan ruang dan infrastruktur serta proses komunikasi yang berbeda, tergantung dari kendala yang muncul.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai politik dan penyandang disabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa politik penyandang disabilitas dalam hal ini ialah peraturan atau kebijakan pemerintah dimana dalam peraturan tersebut mencakup segala aktivitas politik kaum penyandang disabilitas termasuk dalam pemilihan umum guna membawa kehidupan yang harmonis dan tidak adanya diskriminasi. International Foundation for The Electoral System memaparkan beberapa strategi untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan politik penyandang disabilitas, yaitu:¹³

1. Memberdayakan Penyandang Disabilitas

Memberdayakan penyandang disabilitas dan organisasi terkait disabilitas, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat disabilitas, menjadi mitra kunci dalam program yang menysasar penyandang disabilitas dalam pemilu dan politik.

2. Mendukung Lembaga Pemerintahan

Dukungan pemerintah membuat program yang dapat didukung oleh legislatif atau badan penyelenggaran pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas.

¹⁰ Anwar Arifin, "*Politik Pencitraan Politik*" op.cit hal.7

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

¹² Hari Kurniawan,dkk. "*Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*" (Yogyakarta: PUSHAM UII, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015) hal.1

¹³ International Foundation for Electoral System (IFES). "*Akses Setara: Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik*". Washington DC: IFES, 2014. Hal.33

3. Melibatkan Organisasi Disabilitas pada Koalisi Organisasi Masyarakat

Berkerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas, seperti mendukung organisasi penyandang disabilitas untuk menjangkau pemerintah dan meningkatkan kesadaran antara pemerintah dan penyandang disabilitas.

4. Membantu Partai Politik dalam Melakukan Jangkauan Kepada Orang dengan Penyandang Disabilitas

Membantu partai politik dalam menghubungi organisasi penyandang disabilitas untuk mendukung upaya mereka meningkatkan kesadaran akan isu disabilitas yang berdampak pada penyandang disabilitas dan meningkatkan kegiatan politik supaya semua orang berpartisipasi.

Penyandang disabilitas mempunyai hak asasi manusia (HAM) dalam pemenuhan hak politiknya mempunyai kesempatan yang sama dalam hal berpartisipasi pada pemilihan umum atau menjadi bagian dari pemilihan umum.

Politik penyandang disabilitas adalah setiap warga negara khususnya penyandang disabilitas dapat mengambil bagian dalam politik. Hal tersebut mengartikan bahwa para penyandang disabilitas memiliki suara pada pemilihan umum.

Selain itu, penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dan penguasaan yang efektif merupakan salah satu prinsip dari Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini, prinsip partisipasi politik harus diterapkan secara luas karena bagaimanapun penyandang disabilitas di ruang yang sama dengan orang-orang normal lainnya sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi atas dasar kesetaraan.¹⁴

3. Dialektika *Civil Society* dan Negara

Konsep modern masyarakat sipil pertama kali digunakan oleh Hegel dalam Filsafat Hukum pada tahun 1821. Dia percaya “masyarakat sipil adalah ranah kehidupan etis antara keluarga dan negara”. Definisi ini kemudian diusulkan oleh Larry Diamond pada tahun 1994, “*civil society is the realm of organized social life that is voluntary, self generating, self supporting, autonomous from the state, and bound by legal order to set of shared rules*”.

¹⁴ United Nations Human Right, “*The Conventions On The Right of Persons With Disabilities*”. Professional Training Series No.15 hal.37-38

Dengan demikian, *civil society* pada dasarnya masyarakat ingin kebebasan dari hegemoni negara.

Menurut Chandhoke (1955) *civil society* ialah suatu arena dimana masyarakat ada keterkaitan atau termasuk hubungan dengan negara (*“the site at which society enters to a relationship with the state”*). Chandhoke meyakini masyarakat sipil merupakan basis munculnya wacana rasional yang dapat menentang tanggung jawab negara. Dalam hal ini, keberadaan masyarakat sipil harus memenuhi empat syarat: (a) nilai masyarakat sipil berupa partisipasi politik dan tanggung jawab negara; (b) mewakili lembaga masyarakat sipil dalam bentuk forum dan asosiasi publik; (c) perlindungan masyarakat sipil pada umumnya menyangkut hak-hak individu; (d) semua anggota masyarakat sipil dilindungi oleh hukum.

Istilah masyarakat sipil sering diterjemahkan sebagai “masyarakat madani”. Istilah tersebut adalah konsep yang digunakan oleh masyarakat yang sangat beradab pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Dalam konsep negara, masyarakat sipil telah diberi makna kelembutan, komplementaritas dan non-konflik. Masyarakat sipil percaya bahwa tanpa negara yang kuat, masyarakat sipil tidak akan ada artinya. Dengan kata lain, pentingnya masyarakat sipil dalam situasi ini bukanlah senjata bagi perkembangan demokrasi. Tapi maknanya adalah untuk melengkapi negara.

Hickam (1996) berpendapat bahwa:

“Masyarakat sipil adalah realitas kehidupan sosial yang terorganisir, yang bersifat sukarela, mandiri, dan tidak tunduk pada tekanan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat merdeka tanpa hegemoni negara. “Masyarakat Sipil” memiliki konotasi masyarakat yang sadar akan hak-haknya.”

Suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat sipil apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Masyarakat mempunyai inisiatif untuk mengembangkan kegiatannya secara mandiri, kegiatan tersebut berasal dari rakyat itu sendiri, dan negara bertindak menjadi perantara.
- (2) Masyarakat memiliki cara yang bebas untuk mengekspresikan keinginannya, seperti dalam bentuk komunikasi, demonstrasi, dan asosiasi/organisasi, selama tidak bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepentingan campur tangan publik.

Dalam definisi Hegel tentang negara, negara ialah kekuasaan mutlak. Sebab itu, Hegel menentang pemisahan kekuasaan dan negara. Negara hanya dapat membagi kerja untuk

menyelesaikan permasalahan bersama dan tidak memiliki hak untuk membagi kekuasaan (Mukonen, 2000). Pikiran Hegel tidak dapat dipisahkan dalam tesis, antitesis dan dialektika komprehensif. Di dalam bukunya "*The Philosophy of Law*", negara dan masyarakat sipil diperlakukan dalam kerangka dialektika, yakni keluarga adalah tesis, masyarakat sipil adalah antitesis, negara adalah sintesis. Suatu pernikahan didirikan ketika didasarkan pada cinta dan keinginan kedua belah pihak, tetapi juga harus ditanggung oleh akal. Pernikahan bertujuan menghasilkan keturunan, kemudian untuk menopang kehidupan sosial dan negara. Kontinuitas keluarga akan tampak, baik secara material maupun maknawi, dalam partisipasinya mencari nafkah dan bahu membahu dalam pendidikan anak. Hegel menyerukan larangan berpoligami. Ia menyerukan pula menahan diri dari menjatuhkan talak, kecuali pada kondisi tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Namun, ketika keluarga diikat oleh ikatan temporal yang akan hilang dengan kematian salah satu pasangan, sekumpulan keluarga bersepakat membentuk kehidupan sosial dan saling membantu menjaga kepentingan yang khusus. Dari sinilah, masyarakat sipil tumbuh.

Hegel meletakkan masyarakat sipil diantara negara dan keluarga. Artinya, masyarakat sipil berdiri sendiri dan dari keluarga dan negara. Masyarakat sipil yang diilustrasikan oleh Hegel adalah masyarakat setelah Revolusi Perancis, yakni masyarakat yang bebas dari belenggu feodal dan bebas memilih hidup. Namun, dengan kebebasan semacam ini, hukum sangat diperlukan, karena hukum adalah pengarah kebebasan dan akal manusia dalam hubungan di antara anggota masyarakat sipil.

Negara menggantikan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan dasar yang penting. Tujuan filsafat sejarah Hegelian adalah menunjukkan keunggulan masing-masing bangsa melalui dialektika. Sejatinya, semangat dan jiwa bangsa adalah pencipta sejati seni, hukum, etika, dan agama. Oleh karena itu, sejarah peradaban adalah hasil dari peradaban nasionalis yang ditawarkan setiap negara kepada semua. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, pandangan negara menurut Hegel adalah simbol kekuatan politik dan kekuasaan negara dimana negara yang digambarkannya adalah suatu yang mutlak namun juga tidak tirani. Karena negara menurut Hegel harus tetap tunduk pada Undang-Undang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kemampuan mendefinisikan informasi mengenai perilaku objek penelitian meliputi tindakan, perasaan dan pengalaman mereka

terhadap topik utama pembahasan.¹⁵ Penyajian data hasil penelitian kualitatif ini termasuk dalam temuan di lapangan, bergantung pada kemampuan, pengalaman dan rasa peka peneliti saat melakukan interaksi untuk mendapatkan informasi kepada informan yang menjadi objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Diskriminasi Hak Politik Penyandang Disabilitas

Negara Indonesia ialah negara dengan sistem demokrasi, yang mana selalu memperjuangkan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Salah satu indikator demokratis adalah praktik Pemilihan Umum. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia, dapat dikatakan sekitar 15% dari populasi dunia adalah penyandang disabilitas. Menurut data Susenas tahun 2003, jumlah penyandang disabilitas di Asia Tenggara saat ini mencapai 90 juta dari 600 juta, sedangkan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2.454.359 jiwa.¹⁶

Pemilih penyandang disabilitas dikategorikan penting untuk meninjau keberhasilan pemilihan umum. Tetapi jika melihat faktanya, pijakan hukum selama ini belum konsisten dengan implementasinya. Bahkan, tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para pelaku politik itu sendiri. Untuk mewujudkan partisipasi yang maksimal bagi penyandang disabilitas dibutuhkan tata kelola yang baik sehingga tidak ada lagi hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan dalam pemilihan umum.

Secara umum, hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yaitu: (a) hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu; (b) hak untuk didaftarkan guna memberikan suara; (c) hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS); (d) saat memberikan suara, pemilih penyandang disabilitas mendapatkan bantuan oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya; (e) penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra dan kecacatan lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.¹⁷

¹⁵ Lexy J. Moelong. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000). Hal.3-4

¹⁶ Salim Ishak. *“Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusi Indonesia”*, The Politik Vol.1, No.2, Juli 2015.hal.127

¹⁷ Agus Riswanto,dkk. *“Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran KPUD Guna Penguatan Demokrasi Lokal”*, dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang, Vol.4, No.3, 2018. Hal.708

Namun dalam faktanya, terdapat ketidakmerataan hak politik tersebut pada sebagian pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020. Adapun bentuk diskriminasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah

Pemberian informasi tentang pemilu yang umumnya disebut sosialisasi adalah tugas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Melalui sosialisasi, diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas serta memberikan informasi mengenai pemilu baik mengenai tata cara pemungutan maupun nama-nama calon sehingga mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Berikut pemaparan narasumber penyandang disabilitas non-organisasi/komunitas:

“...Gak ada sosialisasi, dari jaman saya ikut pemilihan pertama sampai sekarang gak pernah dapat mbak, alhasil saya gak tau informasi apa-apa tentang calon walikotanya cuma asal nyoblos aja yang penting ikut nyoblos...” (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

“...Tidak ada, karena saya tidak ikut komunitas apa-apa jadinya saya minim informasi cuma tau dari TV saja sama informasi dari keluarga terdekat...” (Pak Shobirin, wawancara pada tanggal 15 Januari 2021)

Sementara itu, berbeda dengan pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam komunitas-komunitas penyandang disabilitas. Berikut pemaparannya:

“...Ya mbak terdapat sosialisasi pemilihan umum, kami komunitas Ikatan Alumni SLB-B Karya Mulia Surabaya (IKAKAMUS) bekerjasama dengan KPU Kota Surabaya untuk menyelenggarakan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 kemarin. Tempatnya di Aula Gedung SLB-B Karya Mulia...” (Pak Willy Sudarta, wawancara pada tanggal 2 Februari 2021).

Berdasarkan pemaparan para narasumber, dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan hanya dilaksanakan pada kelompok penyandang disabilitas yang terdapat di Kota Surabaya, namun dengan waktu yang dijadwalkan oleh kelompok disabilitas tersebut. Hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu.

Selain sosialisasi yang tidak merata dari KPU Kota Surabaya, kurang aktifnya partai politik sebagai peserta pemilu dalam memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas turut menjadikan pemilu di Indonesia masih mengalami diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Padahal partai politik juga memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi. Seperti pada pemaparan *International Foundation for The Electoral System*, untuk mendukung

pelaksanaan politik penyandang disabilitas, partai politik bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kegiatan politik supaya semua penyandang disabilitas baik yang tergabung dalam organisasi maupun tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.

2. Aksesibilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, masih terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah terhadap kelompok penyandang disabilitas. Terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan aksesibilitas TPS bagi kelompok penyandang disabilitas. Seperti lokasi yang sulit diakses oleh sebagian penyandang disabilitas, dan juga fasilitas yang disediakan kurang memadai. Berikut pemaparan narasumber:

“...Menurut saya sudah cukup sih mbak fasilitasnya, cuma ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Lebih ke arah *maintenance* sih mbak, misal kayak alat-alat seperti *template* untuk tuna netra karena faktanya di lapangan banyak *mist*. Kemudian banyak terjadi kayak tulisan yang tidak sesuai, bisa dibilang salah cetak jadi tulisannya tidak bisa terbaca...” (Aswar Sonar, wawancara pada tanggal 23 Januari 2021)

“...Kurang baik menurut saya karena ya saya kan pakai kursi roda ya mbak, nah tempat TPS nya itu lapangan yang agak becek terus banyak rerumputan jadinya agak susah saya kesannya. Mungkin itu yang harus diperhatikan sama pemerintah...” (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat jika aksesibilitas serta fasilitas yang disediakan kurang maksimal sehingga menyulitkan pemilih penyandang disabilitas khususnya penderita tuna daksa dan tuna netra. Padahal fasilitas merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi pada saat penyandang disabilitas menggunakan suaranya. Hal ini telah tercantum pada Pasal 350 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana memberitahukan bahwa lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Menurut Suryatiningsing (2014:9), kriteria TPS yang aksesible adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat rumput;
- b. Adanya got pemisah;
- c. Jalanan tidak licin atau becek;
- d. Membangun TPS di tempat yang rata dan tidak ada tangga;

- e. Bilik suara dilengklapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas tuna netra yaitu *template*;
- f. Meletakkan kotak suara pada ketinggian 100cm dari tanah;
- g. Jika sudah waktunya masuk TPS, penyandang disabilitas tuna rungu harus dicolek atau didekati untuk dipanggil;

Namun demikian, dalam pelaksanaannya berdasarkan pemaparan narasumber, TPS pada tempat tinggalnya masih mempersulit dan tidak sesuai kriteria TPS yang aksesible bagi tuna daksa yang menggunakan kursi roda. Selanjutnya, pada Pasal 356 Ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa penyandang tuna netra dan penyandang disabilitas fisik lainnya dapat memperoleh bantuan dari orang lain pada saat memberikan suara di TPS namun wajib merahasiakan surat suara pemilihan penyandang disabilitas. Berikut pemaparan narasumber:

“...boleh didampingi oleh keluarga mbak, untuk dari pi dalahak KPUnya memang tidak ada, tapi menurut saya sudah cukup dari pihak keluarga atau kerabat terdekat yang mengantar dan memberikan informasi jika kesusahan, pas waktu mencoblos ya saya sendiri...” (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021).

Berdasarkan pemaparan Ibu Hevy, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Surabaya sudah terjamin kerahasiaan suara dari pemilih disabilitas. Hal ini diwujudkan dalam bentuk keadaan bilik suara yang sudah menjamin kerahasiaan suara pemilih. Terjaminnya kerahasiaan suara pemilih penyandang disabilitas sejalan dengan asas pemilihan umum yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu kejujuran selama pelaksanaan pemilu dimana aparat penegak hukum, pemerintah, pemantau pemilu, pemilih dan semua partai politik serta seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu melakukan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ada.

3. Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota membutuhkan Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang biasa disebut PPK yang membantu tugas KPU Kota Surabaya. PPK sendiri telah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 dan PKPU No.3 Tahun 2015. PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan. Untuk menjadi PPK terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi. Semua berkas kelengkapan diperiksa oleh Sub Bagian Hukum KPU Kota Surabaya dan Komisioner. Namun sangat disayangkan pada persyaratan PPK Kota Surabaya terdapat syarat yang berbunyi: “**Mampu secara jasmani**, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba”.

Dengan adanya persyaratan tersebut, mengakibatkan para penyandang disabilitas merasa ragu dan tidak termotivasi untuk ikut andi dalam proses politik di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama. Namun, bagi penyandang disabilitas untuk ikut andil berperan sebagai pelaksana pemilihan umum masih dirasa sulit. Seperti pada pemaparan narasumber berikut ini:

“...Setahu saya belum pernah ada mbak penyandang disabilitas yang jadi anggota pengurus, kalau saya sendiri tidak ada niata mbak, takut saya jika nanti bukannya membantu malah merepotkan yang lainnya...” (Pak Shobirin, wawancara pada tanggal 15 Januari 2022)

“...Daerah sini nggak ada mbak, kalau ditanya saya ada niatan lahyo gak mbak, saya kemana-mana pakai kursi roda, repot kalo mau jadi pengurus, lagian di persyaratan kan harus sehat jasmani, nah saya ini kan udah tergolong sakit mbak jadi ya gak mungkin diterima...” (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

“...Sejauh ini saya rasa belum ada, untuk itu saya berharap dikemudian hari, para penyandang disabilitas dijadikan pengurus pemilihan umum atau kalau bisa sekalian dibuka kesempatan untuk menjadi anggota KPU juga...” (Pak Willy Sudarta, wawancara pada tanggal 2 Februari 2021)

Berdasarkan pemaparan diatas, batasan yang ada menjadikan halangan bagi penyandang disabilitas. Maka dari itu sudah seharusnya negara memberikan kejelasan dan ketentuan serta menjamin kesetaraan hak dalam proses pemilu, khususnya bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka berada dalam situasi yang sama dengan mereka yang memiliki hak demokrasi di Indonesia.

B. Kehadiran Negara dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020

Negara adalah bentuk suatu organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara dengan membuat konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar tersebut memberikan batasan juga mengenai bagaimana seharusnya kekuasaan negara tersebut harus dijalankan.¹⁸ Seperti pandangan Hegel, negara adalah simbol kekuatan politik dan kekuasaan negara yang digambarkan sebagai suatu yang mutlah namun tidak tirani karena harus tetap tunduk pada undang-undang.

¹⁸ Rizkon Maulana, dkk. “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum*”, Kosmik Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol.19 No.2. 2019

Jika mempelajari konstitusi atau undang-undang di setiap negara, didalamnya secara umum selalu termuat tiga kelompok muatan yaitu: (a) pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM); (b) pengaturan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; (c) pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.¹⁹ Hak-hak politik termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dimana hak tersebut berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.²⁰

Pemilu merupakan perayaan terbesar dari sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi. Dimana seluruh rakyat dapat merasakan pesta tersebut tanpa terkecuali. Maka dari itu, segala hal yang mengurangi kemewahan pesta demokrasi harus disingkirkan termasuk adanya ketentuan yang dapat menghadirkan diskriminasi hak politik kepada kelompok tertentu. Seperti dalam konsep HAM, dimana tidak menghendaki terdapat perbedaan pada golongan tertentu, termasuk penyandang disabilitas. Akan tetapi, fakta di lapangan memperlihatkan masih terdapat perlakuan diskriminatif yang membuat para penyandang disabilitas kehilangan hak-hak politiknya.

Misalnya di Amerika, hukum melindungi hak dasar warga negaranya, nmaun juga memberi negara kewenangan untuk menetapkan persyaratan pemberian suara untuk pemilihan umum tingkat federal maupun tingkat negara bagian. Oleh sebab itu, setiap negara bagian memiliki persyaratan pemungutan suara yang berbeda pula. Dari 50 negara bagian, 39 negara bagian dari ibukota, Washington DC, memiliki undang-undang yang mengizinkan hakim untuk melepaskan hak politik penyandang disabilitas yang dianggap tidak kompeten dalam pemilihan umum. Beberapa di negara bagian, diketahui jika saat mengisi formulir pendaftaran, seseorang harus menjawab apakah ia pernah dinyatakan tidak mampu secara kejiwaan untuk memilih. Begitu menjawab bahwa dirinya pernah dinyatakan tidak mampu berdasarkan ketetapan pengadilan dan kemampuan ini tidak dipulihkan oleh pengadilan, orang tersebut mau tidak mau dinyatakan tidak layak untuk memilih.²¹

¹⁹ Yulia Netta, "*Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*", Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan. Vol.1 PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013. Hal.50

²⁰ Fuad Fachruddin, "*Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama*", Pustaka Alfabet, 2006. Hal.35-36

²¹ Utami Hussin, "*Komparasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Amerika Serikat dan Indonesia*", tersedia di <https://www.voaindonesia.com/a/komparasi-hak-pilih-penyandang-disabilitas-mental-di-as-dan-indonesia-/4864128.html>

Berbeda dengan Indonesia, demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM lahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian seiring berjalannya waktu, sebagai anggota PBB, Indonesia meratifikasi instrumen Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kemudian, Indonesia juga meratifikasi konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dan yang terakhir yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.²²

1. Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Surabaya

Meskipun fakta di lapangan masih terdapat perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, namun KPU Kota Surabaya mengaku telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Karena bagaimanapun, KPU memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana pemaparan narasumber berikut ini:

“...Jadi KPU Surabaya telah berupaya semaksimal mungkin agar penyandang disabilitas memiliki porsi yang sama dengan pemilih yang lain, untuk pemberian info atau sosialisasi KPU Surabaya dibantu dengan adanya relawan demokrasi basis penyandang disabilitas untuk memudahkan berkomunikasi seperti penyandang tuna rungu kan harus memakai bahasa isyarat. Untuk penyandang disabilitas tuna netra KPU Surabaya sudah menyiapkan *template* braille untuk memberikan informasi tentang calon A dan calon B. jadi karena terbatasnya SDM, KPU Surabaya memberikan anggaran sekian kepada relawan demokrasi, nah mereka ini yang mensosialisasikan kepada komunitas-komunitas mereka...” (Ibu Naafilan Astri, S.Sos, M.IP, wawancara pada tanggal 11 Januari 2021)

Dalam pemilihan umum, sosialisasi politik ini akan sangat berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Karena untuk menghasilkan pemilih yang bijak yang mana memberikan suaranya secara rasionalitas, sosialisasilah yang membentuk hal tersebut. Sayangnya, pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kota Surabaya terbatas pada pemilih disabilitas yang terdaftar pada komunitas. Sebagaimana pemaparan narasumber berikut ini:

“...Nah itu mbak, untuk yang tidak terdaftar dalam organisasi atau komunitas kami juga tidak tahu, seperti yang sudah saya jelaskan, SDM kami kan terbatas ya, tapi yang jelas petugas di TPS selalu dihimbau jika terdapat penyandang disabilitas agar membantu.

²² Rizkon Maulana, dkk. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum”, *Kosmik Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol.19, No.2, tahun 2019. Hal.144

Misalnya terdapat penyandang disabilitas yang tuna rungu, nah itu harus diberi pengarahan dan selalu diingatkan jika namanya dipanggil untuk mencoblos...” (Ibu Naafilah Astri, S.Sos, M.IP, wawancara pada tanggal 11 Januari 2021)

Namun meski demikian, dengan terbentuknya Relawan Demokrasi pada pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020, upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas semakin besar. Program KPU Kota Surabaya yaitu Relawan Demokrasi (Relasi) adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Relawan Demokrasi ini yang akan menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih di kabupaten/kota. Pada program Relasi ini, terdapat 10 basis pemilih dimana salah satunya adalah basis penyandang disabilitas, seperti pemaparan berikut:

“...Kebetulan saya itu termasuk Relawan Demokrasi basis disabilitas Pilkada Surabaya Tahun 2020. Jadi, KPU Kota Surabaya punya program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, nah saya selain memberikan sosialisasi kepada komunitas saya sendiri, saya juga memberikan sosialisasi kepada komunitas-komunitas yang lain untuk menyadarkan bahwa kita juga mempunyai hak untuk memilih sebagai warga negara. Meskipun memang jumlah Relasi (Relawan Demokrasi) ini tidak banyak, paling tidak KPU sudah berupaya mbak agar penyandang disabilitas melekat politik...” (Aswar Sonar, wawancara pada tanggal 23 Januari 2021)

Dikutip dari website KPU Kota Surabaya, Relawan Demokrasi (Relasi) basis disabilitas melakukan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Relasi disabilitas yang beranggotakan sebanyak 7 orang tersebut salah satunya adalah narasumber peneliti, yaitu Bapak Aswar Sonar, kompak menggelar webinar melalui aplikasi *zoom* diiringi performa musik dari Relasi disabilitas guna menghibur peserta webinar. Dilakukannya sosialisasi via *zoom* dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menjadi kendala untuk melakukan sosialisasi secara langsung. Namun bukan berarti sosialisasi tatap muka tidak dilakukan sama sekali, ketua Relasi disabilitas mengaku jika akan melakukan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan dengan menggunakan protokol kesehatan.²³

Adapun untuk biaya pada saat sosialisasi, menurut pemaparan Kasubag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Endang Sri Arti Rahayu tidak ada anggaran khusus untuk Relawan Demokrasi. Berikut pemaparannya:

“...Tidak ada anggaran khusus mbak untuk masing-masing anggota Relawan Demokrasi, hanya saja diberikan uang transport sebesar Rp. 150.000,- untuk kebutuhan

²³ KPU Kota Surabaya dapat diakses di <https://kpu-surabayakota.go.id/> diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 16.31 WIB

sosialisasi...” (Ibu Endang Sri Arti Rahayu, wawancara via telepon pada tanggal 12 Juli 2021)

Dalam hal aksesibilitas dan fasilitas KPU Kota Surabaya telah berupaya agar para pemilih penyandang disabilitas dapat dengan mudah memberikan pilihan suaranya, seperti pada pemaparan berikut ini:

“...Kami sudah mempermudah akses TPS ya mbak, seperti sarana dan prasarana yang disediakan selalu diperbaiki apa yang kurang baik itu untuk masyarakat umum maupun penyandang disabilitas. Contohnya KPU telah menyediakan alat bantu bagi penyandang tuna netra, alat bantu tersebut dibuat menggunakan huruf khusus yang dapat dibaca oleh penyandang tuna netra yaitu huruf braille, untuk penyandang daksa pihak penyelenggara menyediakan bilik suara khusus yang agak rendah demi memberikan kenyamanan bagi pemilih dalam proses pemilihan kemudian TPS yang disediakan tidak boleh di tempat yang ada tangganya...” (Ibu Naafiah Astri, S.Sos, M.IP, wawancara pada tanggal 11 Januari 2021)

Namun sangat disayangkan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan huruf braille yang tidak timbul dan tidak bisa dibaca oleh penyandang disabilitas tuna netra. Artinya, KPU Kota Surabaya masih belum maksimal dalam mengupayakan pemenuhan aksesibilitas. Dalam hal ini seharusnya KPU Kota Surabaya berkoordinasi dengan KPPS yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara perlu mendapat bimbingan terkait pelaksanaan pemungutan suara agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan adanya diskriminasi pada penyandang disabilitas. Karena TPS yang tidak aksesibilitas bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 dimana dalam Pasal 17 ayat (2) memaparkan ketentuan TPS harus dibuat di tempat yang mudah dijangkau termasuk penyandang disabilitas dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya.

2. Problematika yang Dihadapi KPU Kota Surabaya dalam Pemenuhan Hak Politik Disabilitas

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan KPU Kota Surabaya untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas, tidak menutup kemungkinan jika terdapat kendala atau problematika yang dihadapi. Salah satunya adalah soal pendataan semua penyandang disabilitas yang telah memenuhi kondisi yang ditetapkan undang-undang. Sering terjadi perkara yang bersangkutan tidak berada pada lokasi atau ketidaksesuaian alamat KTP dengan alamat domisili pemilih.

Pendataan pemilih buat dimasukkan ke dalam DPT diawali pada pencatatan secara langsung setiap kepala keluarga atau biasa disebut pemutakhiran data yang dilaksanakan PPS dan PPK. Kemudian PPS dan PPK menyerahkan data yang sudah dimutakhirkan pada KPU

Kota dan Kabupaten buat disampaikan dan ditetapkan serta dijadikan DPT nasional oleh KPU Pusat. Data itulah sebagai landasan bagi KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara. Dengan demikian, apabila anggota keluarga tidak memberi keterangan jika anggota keluarganya menyandang disabilitas akan sangat sulit bagi KPU Kota Surabaya mendata penyandang disabilitas tersebut.

Untuk itu, upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Seperti dalam konsep Dialektika *civil society* dengan negara, tanpa negara yang kuat, *civil society* tidak akan ada artinya begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, pentingnya *civil society* dalam situasi ini bukanlah sebagai senjata bagi perkembangan demokrasi namun untuk melengkapi negara itu sendiri. Jika usaha dan realisasi berjalan dengan cepat, perwujudan untuk memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas akan terlaksana dengan baik.

Kesimpulan

Untuk memenuhi hak politik, terutama pada sosialisasi masih terdapat adanya diskriminasi. Sosialisasi masih diselenggarakan hanya pada penyandang disabilitas yang terdaftar pada organisasi/komunitas. Sementara pemilih penyandang disabilitas yang tidak tergabung pada organisasi-komunitas tidak menerima. Hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu. Pada sarana dan prasarana Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020 masih dikategorikan permasalahan yang paling utama untuk penyandang disabilitas. Meskipun dari pihak KPU telah berupaya menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai, namun fakta di lapangan masih terdapat kendala yang membuat para pemilih penyandang disabilitas merasakan kesulitan dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Berdasarkan penelitian, belum ada penyandang disabilitas yang menjadi anggota penyelenggara pemilihan umum. Namun, KPU memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk ikut andil dalam program Relawan Demokrasi (Relasi). Dengan begitu, para penyandang disabilitas dapat ikut berpartisipasi untuk meningkatkan angka partisipatif penyandang disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pemilih dari kelompok penyandang disabilitas yang cukup signifikan dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020.

Daftar Pustaka

A Dahl, Robert, 2001 "Perihal Demokrasi", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Andriani, Henny, dan Febri Ansari, (2020), “HAK PILIH KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI SUMATERA BARAT”, Jurnal Konstitusi Volume 17 No.4 Desember tahun 2020
- Arifin, Anwar, (2014), “Politik Pencitraan – Pencitraan Politik”, yogyakarta: GRAHAILMU
- Asshiddiqie, Jimly 2006, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Azwar, aifuddin, (2007), “Metode Penelitian”, yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam, (2008), “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, jakarta: ,PT Gramedia PustakaUtama
- Bungin, Burhan, (2003), “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Creswell John W, (2013), “Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed”, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Daulay, Zainul, (2013), “Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusifserta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas”, Makalah, Seminar Sehari, Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat
- Drs. SuparnoEP, “Glosarium Kata serapan dari bahasa Barat dengan Etimologinya”, Semarang MediaWiyata
- Fachruddin Fuad, (2006), “Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama”, PustakaaAlvabet
- G. Pratama Taufiq, (2019,), “Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)”, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- Hadiawan Agus, (2009), “Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi International Foundation for Electoral, (2014), “Akses Setara: Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik
- Irtanto, 2008, “Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah”, yogyakarta, Pustaka Pelajar
- J. MoleonLexy, (2007), “Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)”, baandung: Remaja Rosdakarya
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke tiga, (2001) DEPDIKBUD, Jakarta; Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 208, Edisi Keempat, Jakarta : Balai Pustaka
- Kurniawan, Hari d kk., (2015), “Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas” yogyakarta: PUSHAM UI

- Manan, Bagir, dkk, (2006), "Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia" Alumni 2006
- Netta yulia, (2013), "Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia", Monografukum Kesejahteraan vol. 1 PKPUU: Fakultas Hukum universitas lampung
- Nurtjahjo, Hendra (2006), "Filsafat Demokrasi", Jakart Bumi Aksara Oktavian, Faizal, "Politik Ekologi Pada Ara Lokal Studi Kasus Rencana Pembangunan Pengelolaan Liimbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Surabaya UINSA
- Rahayu, Sugi, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, (2013) "Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta" Yogyakarta
- Sugiyono, Ilhamuddin, & Arief Rahmawan, (2004), "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance"
- Sugiyono, (2012), "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B", bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2009.), "Statistika Untuk Penelitian", bandung: Alabeta Tricahyo, Ibnu (2009), "Reformasi pemilu menuju pemisahan pemilu nasional dan lokal", malang In Trans Publishing
- T. Soedarsono, (2005), "Dinamika Kelompok", Universitas Terbuka, Jakarta Tohirin (2013), "Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling", Jakarta; Grafindo Persada
- Waradani, Igak, 2008, "Pengantar Pendidikan Luar Biasa, jakarta: Universitas Terbuka.
- Hadiawan, Agus, "Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung)", Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol. 3 No.7 Juli-Desember
- Ishak, Salim, (2015), "Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia", The Politic, Vol. 1, No. 2, Juli 2015, Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin
- Maulana, Rizkon dkk, (2019), "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum"
- Riewanto, Agus, dkk, (2018), "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal", dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang, Vol 4 No. 3 tahun 2018

Siad Ode, Muhammad, (2019) “Peran KPU Surabaya Dalam Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula Dalam PILWALI Surabaya 2015” Hussin, Utami, “Komparasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Amerika Serikat dan Indonesia” Tersedia di <https://www.voaindonesia.com/a/komparasi-hak-pilih-penyandang-disabilitas-mental-di-as-dan-indonesia-/4864128.html>

<https://kpu-surabayakota.go.id/struktur-organisasi/>